

***THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, INFORMATION TECHNOLOGY USE, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH HUMAN RESOURCES COMPETENCE AS A MODERATING VARIABLE***

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Novia Puspita<sup>1\*</sup>, Juanda Astarani<sup>2</sup>, Ira Ghanita Mustika<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[noviapuspita335@gmail.com](mailto:noviapuspita335@gmail.com)<sup>1</sup>, [juanda.atarani@ekonomi.untan.ac.id](mailto:juanda.atarani@ekonomi.untan.ac.id)<sup>2</sup>,

[Ira.grania.m@ekonomi.untan.ac.id](mailto:Ira.grania.m@ekonomi.untan.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of internal control systems, the utilization of information technology, and organizational commitment on the quality of local government financial statements, with human resource competence as a moderating variable. The background of this study is based on the persistence of various issues in the quality of local government financial reporting, despite the fact that most local governments in Indonesia have received an Unqualified Opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). This study employs a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to structural officials and financial management personnel within Local Government Work Units in Pontianak City and Kubu Raya Regency. Data analysis was conducted using Partial Least Squares (PLS) with the assistance of WarpPLS software version 8.0. The results indicate that internal control systems, the utilization of information technology, and organizational commitment have a positive effect on the quality of local government financial statements. However, human resource competence is not able to moderate the relationship between internal control systems, information technology utilization, and organizational commitment with the quality of local government financial statements. These findings support stewardship theory, goal-setting theory, and agency theory, which emphasize the importance of accountability and the responsibility of public officials in public financial management.*

**Keywords:** *internal control systems, information technology utilization, organizational commitment, human resource competence, local government financial statements*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi (TI), dan komitmen organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ditemukannya berbagai permasalahan dalam kualitas LKPD, meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pejabat struktural dan aparatur pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software WarpPLS versi 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI, pemanfaatan TI, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Namun demikian, kompetensi SDM tidak mampu memoderasi hubungan antara SPI, pemanfaatan TI, dan komitmen organisasi dengan kualitas LKPD. Hasil penelitian ini mendukung teori stewardship, teori goal setting, dan teori agensi, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab aparatur dalam pengelolaan keuangan public.

**Kata kunci:** sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas LKPD.

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan diterapkannya berbagai regulasi

yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah turut mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih mandiri, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik memungkinkan pemerintah daerah menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara efektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Ulisanti & Asrori, 2021).

Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut tercermin dalam penyusunan LKPD. LKPD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022). Tingkat pemahaman aparatur terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga berperan dalam menentukan kualitas laporan keuangan, karena penerapan standar yang tepat akan menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (D. Hidayat et al., 2021).

Meskipun demikian, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas LKPD masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagian besar LKPD memang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih ditemukan ribuan temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang

berdampak pada kerugian dan potensi kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang optimal, karena masih terdapat permasalahan dalam sistem, prosedur, maupun kepatuhan administrasi yang memengaruhi keandalan laporan keuangan (BPK, 2024).

Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas LKPD adalah sistem pengendalian internal (SPI). Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Penerapan SPI yang efektif dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai prosedur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD, karena semakin baik pengendalian yang diterapkan, semakin tinggi pula keandalan informasi keuangan yang dihasilkan (Alpi & Akbar, 2024). Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa SPI tidak selalu berpengaruh signifikan, karena kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi (Gustina, 2021).

Selain SPI, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan LKPD. Pemerintah telah mendorong penerapan sistem informasi keuangan daerah melalui kebijakan yang mengatur pengembangan sistem informasi secara terpadu, sehingga proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Penerapan

sistem seperti SIMDA dan SIPKD membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, karena teknologi mempermudah proses pengolahan data dan mengurangi kesalahan manual (Harpidalinda & Karpriana, 2024). Namun, terdapat pula temuan yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak selalu memberikan pengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan sistem tersebut (Satriawan & Dewi, 2020).

Faktor lain yang turut memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan tingkat kesediaan pegawai untuk bekerja secara optimal, mematuhi nilai-nilai organisasi, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Komitmen yang tinggi dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap teknologi, prosedur, dan standar pelaporan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik (Lubis et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD karena aparatur yang memiliki loyalitas dan tanggung jawab tinggi cenderung bekerja lebih teliti dan profesional (Harpidalinda & Karpriana, 2024). Meskipun demikian, beberapa penelitian menemukan bahwa komitmen organisasi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, karena komitmen perlu didukung oleh kompetensi dan sistem kerja yang memadai agar dapat berdampak pada kinerja (Aziyah & Yanto, 2022).

Dalam hubungan tersebut, kompetensi sumber daya manusia (SDM) sering dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh SPI, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD.

Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional memungkinkan aparatur memahami prosedur, menerapkan standar akuntansi dengan benar, serta memanfaatkan teknologi secara optimal (Sambuaga et al., 2020). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak selalu mampu berperan sebagai variabel moderasi, terutama ketika sistem atau teknologi yang digunakan belum berjalan secara optimal (Desi Lestari et al., 2022).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas LKPD, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, serta kompetensi SDM. Penelitian ini memodifikasi model sebelumnya dengan menggabungkan ketiga variabel independen tersebut dan menempatkan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi, serta memfokuskan objek penelitian pada pemerintah daerah di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas LKPD serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Stewardship**

Teori stewardship menurut Davis *et al.* (1997) menjelaskan situasi di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang motifnya selaras dengan tujuan para prinsipal. Teori ini menjelaskan bahwa seorang manajer berperan sebagai *steward* ketika ia menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola dengan mengedepankan kepentingan organisasi dan para pemangku

kepentingan (Utami *et al.*, 2024). Teori *stewardship* didesain untuk menguji situasi saat para eksekutif di dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Siladjaja *et al.*, 2023).

Dalam sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berperan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik. Pemerintah sebagai *steward* yang berfungsi mengelola sumber daya, dan rakyat sebagai principal pemilik sumber daya, terikat dalam kesepakatan yang dilandasi oleh kepercayaan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi (Julia & Wahidahwati, 2020). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward* untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (principal) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut (Sari, 2021).

Oleh karena itu, teori *stewardship* relevan digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya nilai tanggung jawab, loyalitas, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia berkontribusi terhadap kualitas LKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

### **Teori Goal Setting**

Teori *Goal Setting* menurut Locke (1968) menyatakan bahwa menyatakan bahwa tujuan yang disadari akan memengaruhi tindakan, dan tujuan yang spesifik serta menantang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang mudah atau samar. Tujuan tersebut akan lebih mudah dicapai apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu spesifik, menantang, dapat dicapai, serta didukung dengan komitmen individu

terhadap pencapaiannya. Dengan adanya penetapan tujuan atau *goal setting*, individu akan lebih terarah dalam bertindak dan bekerja, karena tujuan tersebut menggambarkan keadaan ideal yang ingin dicapai dan sekaligus menjadi acuan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sutrisno & Arsanti, 2023).

Lebih lanjut, menurut Sutrisno & Arsanti (2023) terdapat tiga mekanisme utama bagaimana *goal setting* memengaruhi perilaku individu. Pertama, berfungsi sebagai direktif, yaitu mengarahkan perhatian dan usaha individu secara langsung pada pencapaian tujuan. Kedua, berfungsi sebagai pemberi energi, di mana individu akan terdorong untuk berusaha lebih keras. Ketiga, *goal setting* meningkatkan persistensi, yakni upaya yang konsisten dan berulang sampai tujuan tercapai. Penetapan tujuan menjadi teknik yang sangat efektif untuk memotivasi karyawan, terutama ketika diterapkan dengan benar, dimonitor secara hati-hati, dan didukung aktif oleh manajer (Ivancevich *et al.*, 2006). Sejalan dengan itu, teori ini memusatkan perhatian pada pentingnya proses penetapan tujuan itu sendiri, di mana tujuan yang spesifik dan menantang akan berfungsi lebih efektif sebagai faktor motivasi dalam meningkatkan kinerja individu maupun kelompok (Hutagalung & Simatupang, 2023).

Dalam konteks akuntansi sektor publik, *Goal Setting Theory* relevan untuk memahami bagaimana tujuan organisasi yang terukur dan terarah, seperti penyusunan LKPD yang berkualitas, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Misalnya, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tujuan konkret akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih fokus dan akuntabel dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah

### **Teori Agensi**

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara pemilik

(*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan sebagai suatu kontrak. *Principal* adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori agensi merupakan kontrak kerja yang mengatur pembagian peran dan manfaat bagi masing-masing pihak dengan tetap mempertimbangkan hasil yang dicapai (Subroto & Endaryati, 2024).

Pemilik perusahaan (*principal*) selalu menginginkan informasi terkait seluruh aktivitas perusahaan, termasuk pengelolaan dana yang diinvestasikan, sehingga melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun manajemen sebagai agen, *principal* memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus sarana untuk menilai kinerja agen dalam periode tertentu (Purba, 2023). Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Halim & Abdullah, 2006). Dalam sektor publik, masyarakat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah bertindak sebagai agen yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya publik. Ketika pemerintah kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka pemerintah diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi *principal* (Halim & Abdullah, 2006).

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai *principal*. Faktor-faktor seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kompetensi SDM diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan tepat waktu, akurat, serta rendahnya kesalahan

### **Pengembangan Hipotesis**

Dalam teori *stewardship*, Pemerintah sebagai steward yang berfungsi mengelola sumber daya, dan rakyat sebagai *principal* pemilik sumber daya, terikat dalam

kesepakatan yang dilandasi oleh kepercayaan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi (Julia & Wahidahwati, 2020). Pengelolaan sumber daya yang dimaksud salah satunya melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan dalam pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dan akurat (Anggreni & Dewi, 2022).

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya (Maulida & Tumirin, 2025). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas LKPD disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) (Gustina, 2021).

Aziyah & Yanto (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintah diharuskan menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, proses pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan lebih mudah tercapai, sehingga dapat mendukung terciptanya informasi keuangan yang andal, relevan, dan berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Harpidalinda *et al.* (2024); Sambuaga *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Semakin efektif sistem pengendalian internal, maka akan semakin baik pula kualitas LKPD (Ulisanti & Asrori, 2021).

**H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Internal (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan public (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan sistem kerja yang terintegrasi antar unit organisasi di pemerintah pusat ataupun antar SKPD di Pemerintah Daerah dan bahkan antara pemerintah pusat dan daerah (Alpi & Akbar, 2024).

Berdasarkan Teori *Stewardship*, pengelola organisasi sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan bersifat relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi informasi menjadi alat penting dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut karena mampu meningkatkan efisiensi proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan (Harpidalinda *et al.*, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan (Ridzal *et al.*, 2022). Dukungan perangkat komputer dan jaringan juga mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan, sehingga laporan keuangan tetap memenuhi prinsip ketepatanwaktuan (Alpi & Akbar, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Ulisanti & Asrori (2021) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga disimpulkan semakin banyak pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap**

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Pada sebuah organisasi lainnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompoten dan memahami teori-teori akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Anggreni & Dewi, 2022). Jika seorang pegawai memiliki komitmen, maka tujuan organisasi akan tercapai dengan baik karena pegawai bekerja atas kemauan sendiri dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga komitmen pribadi menjadi hal penting untuk mencapai keberhasilan organisasi (Ayem & Amahala, 2023).

Komitmen organisasi merupakan bentuk identifikasi dan keterlibatan seseorang dalam pekerjaannya, yang mencakup komitmen terhadap tugas, profesionalisme, arti penting karier, serta pengaruh nilai-nilai lokal dan profesional, di mana komitmen ini tidak semata-mata mengarah pada loyalitas terhadap organisasi atau jenjang karier, melainkan lebih pada dedikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan itu sendiri (Raharjo *et al.*, 2023). Komitmen organisasi yang tinggi dari karyawan memudahkan suatu organisasi mewujudkan pengendalian internal yang memadai untuk memberikan kepercayaan tentang keandalan laporan keuangan kepada pengguna dari laporan keuangan koperasi tersebut (Anggreni & Dewi, 2022).

Ayem & Amahala (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan komitmen organisasi dari manusia agar tercapainya suatu keberhasilan yang diharapkan oleh perusahaan atau instansi dan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yogantara & Asana (2021) yang menjelaskan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD.

Semakin tinggi komitmen organisasi, maka kualitas LKPD akan semakin baik, dan sebaliknya, rendahnya komitmen organisasi akan berdampak pada menurunnya kualitas LKPD (Ayem & Amahala, 2023; Yogantara & Asana, 2021).

**H3: Komitmen Organisasi (X3) berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD (Y)**

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pembuatan laporan keuangan seharusnya memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang akuntansi, termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Maulida & Tumirin, 2025). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik serta kegiatan dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien (Rahman & Permatasari, 2021). Semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia maka Kualitas Laporan Keuangan daerah akan semakin meningkat (Eo Kutu Goo, 2022).

Kompetensi SDM diduga tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan tersebut, karena SDM yang memiliki kemampuan unggul akan mampu mengimplementasikan pengendalian internal secara efektif serta memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan saat ini, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan (Kamandita & Suwandi, 2025). Kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan secara optimal. Dengan demikian, melalui kompetensi yang dimiliki, dapat dinilai sejauh mana suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien (Elfauzi & Sudarno, 2019), dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mempermudah seluruh pengurus dalam mewujudkan pengendalian internal yang memadai (Anggreni & Dewi, 2022).

**H4: Kompetensi SDM (Z) memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).**

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Zubaidi *et al.*, 2019). SDM merupakan barometer atau tolak ukur untuk menentukan perkembangan suatu institusi atau bisnis, serta mewakili aset dan kekayaan utama dalam setiap organisasi (Rahman & Putera, 2024). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi perlu didukung oleh SDM yang berkompeten karena operasional organisasi sangat bergantung pada kinerja pegawainya, serta ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien (Ramadhanti & Rufaedah, 2023). Semakin baik kompetensi SDM, semakin besar pula pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena kompetensi yang memadai akan mendorong proses penyusunan laporan keuangan berjalan secara maksimal, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Anggreni & Dewi, 2022).

Hal ini diperkuat oleh temuan Ulisanti & Asrori (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak hanya berperan langsung terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan

kualitas LKPD. Kompetensi SDM yang tinggi akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pegawai yang memiliki kompetensi yang kuat juga cenderung memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi, sehingga mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku, menghasilkan laporan yang andal dan berkualitas (Wahyuni & Herawati, 2024). Selain itu, pengalaman kerja yang dimiliki memungkinkan mereka bekerja secara efisien, sehingga laporan keuangan dapat disusun tepat waktu, tetap relevan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (Nurdin *et al.*, 2024).

**H<sub>5</sub>: Kompetensi SDM (Z) memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>2</sub>) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Komitmen organisasi merupakan sikap individu yang menunjukkan keterikatan terhadap organisasi, baik melalui kelekatan emosi, identifikasi diri, keterlibatan dalam aktivitas organisasi, maupun keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut (Alpi & Akbar, 2024). Namun demikian, sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja (*job performance*) tinggi (Kertiriasih *et al.*, 2023). Artinya, komitmen tanpa diimbangi oleh kompetensi belum cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkompeten umumnya didukung oleh latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman di bidang keuangan, sehingga mampu menyusun laporan keuangan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurdin *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, pengembangan kompetensi

SDM menjadi sangat penting agar komitmen organisasi yang ada dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas LKPD.

**H<sub>6</sub>: Kompetensi SDM (Z) memoderasi hubungan antara Komitmen Organisasi (X<sub>3</sub>) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Pendekatan ini berlandaskan filsafat positivisme yang menekankan pengukuran objektif terhadap fenomena sosial melalui instrumen penelitian dan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS versi 8.0.

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Populasi penelitian meliputi pejabat struktural yang terlibat dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah, yaitu pejabat eselon II, III, dan IV pada 32 OPD di Kota Pontianak dan 37 OPD di Kabupaten Kubu Raya.

Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pelaporan keuangan daerah. Jumlah sampel utama ditetapkan sebanyak tiga responden pada setiap OPD sehingga diperoleh 207 responden, serta tambahan 69 responden yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan untuk pengukuran variabel kompetensi sumber daya manusia. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan penyusunan laporan.

Data penelitian terdiri dari data

primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kuesioner berbasis skala Likert yang disusun dari indikator variabel penelitian (Untari, 2023), sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi BPKAD Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya terkait ketepatan waktu dan koreksi laporan keuangan. Variabel penelitian meliputi kualitas LKPD sebagai variabel dependen, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, serta kompetensi SDM sebagai variabel moderasi.

Analisis data dilakukan melalui, pengujian outer model (validitas dan reliabilitas), serta inner model untuk menilai hubungan antarvariabel menggunakan indikator R-square, Q-square, APC, dan ARS (Hardisman, 2022). Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai koefisien jalur dan p-value < 0,05 (Sholihin & Ratmono, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pegawai OPD di Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 207 kuesioner, serta 69 kuesioner

tambahan untuk variabel kompetensi SDM. Dari jumlah tersebut, kembali sebanyak 105 kuesioner utama dan 63 kuesioner kompetensi SDM, sehingga tingkat respons masing-masing sebesar 50,24% dan 91,30%. Seluruh kuesioner yang kembali dinyatakan layak untuk diolah dan digunakan dalam analisis penelitian.

### Analisis *Partial Least Square* (PLS)

#### Pengukuran *Outer Model*

Pada penelitian ini dilakukan empat pengujian outer model, yaitu uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji multikolinieritas, uji *discriminant validity* dengan kriteria Fornell-Larcker, serta uji reliabilitas melalui *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga model layak digunakan dalam penelitian ini.

Pada uji validitas konvergen, nilai *factor loading* seluruh indikator berada di atas 0,50 sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya, uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan batas  $\leq 5$ . Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada < 5, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 1**  
**Pengukuran *Outer Model***

Nama Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>AVE</i>	Keterangan
X1	0.979	0.977	0.691	Reliabel
X2	0.969	0.963	0.795	Reliabel
X3	0.934	0.917	0.641	Reliabel
Z	0.97	0.968	0.634	Reliabel
Y	0.924	0.836	0.859	Reliabel
X3Z	1	1	1	Reliabel
X2Z	1	1	1	Reliabel
X1Z	1	1	1	Reliabel

Keterangan :  
 X1 = Sistem Pengendalian Internal; X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi; X3 = Komitmen Organisasi; Z = Kompetensi Sumber Daya Manusia; Y = Kualitas LKPD;  
 X1Z = Sistem Pengendalian Internal\*Kompetensi SDM; X2Z = Pemanfaatan Teknologi Informasi\*Kompetensi SDM; X3Z = Komitmen Organisasi\*Kompetensi SDM

Berdasarkan Tabel 1 pengujian *discriminant validity* melalui kriteria

Fornell-Larcker menunjukkan bahwa nilai Average Variance Extracted (AVE) masing-masing konstruk lebih besar dari 0,50, yang berarti model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang baik. Selain itu, hasil uji reliabilitas konstruk yang diukur menggunakan Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,60, sehingga dinyatakan reliabel. Dengan demikian, seluruh indikator dan konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan.

### Pengukuran Inner Model

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model

struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur.

**Tabel 2**  
**Nilai R-Square**

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.844	0.827

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *R-square* Kualitas LKPD sebesar 0,844. Hal ini

menunjukkan bahwa Nilai R Square  $\geq 0,75$  maka model dinyatakan kuat.

**Tabel 3**  
**Goodness of Fit Model**

<i>Model Fit and Quality Indices</i>	Kriteria Fit	Nilai	Keterangan
<i>Average path coefficient (APC)</i>	<i>p-value</i> < 0,05	P = 0,019	Memenuhi
<i>Average R-squared (ARS)</i>	<i>p-value</i> < 0,05	P < 0,001	Memenuhi
<i>Average Adjusted R-Squared (AARS)</i>	<i>p-value</i> < 0,05	P < 0,001	Memenuhi
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	$AVIF \leq 5$	3,391	Memenuhi
<i>Tanenhau GoF (GoF)</i>	<i>small</i> $\geq 0.1$ , <i>medium</i> $\geq 0.25$ , <i>large</i> $\geq 0.36$	0,836	<i>Large</i>
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	<i>acceptable</i> if $\geq 0.7$ , <i>ideally</i> = 1	0,833	Memenuhi
<i>R-squared contribution ratio (RSCR)</i>	<i>acceptable</i> if $\geq 0.9$ , <i>ideally</i> = 1	0,979	Memenuhi
<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	<i>acceptable</i> if $\geq 0.7$	1,000	Memenuhi
<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)</i>	<i>acceptable</i> if $\geq 0.7$	0,917	Memenuhi

Berdasarkan tabel 3 maka diperoleh hasil uji *Goodness of Fit*, sebagai berikut :

- Nilai *Average Path Coefficient (APC)*, *Average R-Squared (ARS)*, dan *Average Adjusted R-Squared (AARS)* masing-masing memiliki nilai *P-Value* < 0,05, yang menunjukkan bahwa hubungan dalam model signifikan

secara statistik.

- Nilai *Average Block VIF (AVIF)* yaitu sebesar 3,391 ( $AVIF \leq 5$ ) yang artinya masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model ini.
- Nilai *Tanenhau GoF (GoF)* yaitu

sebesar 0,836 menunjukkan bahwa model memiliki kualitas keseluruhan yang tinggi, karena melebihi ambang batas untuk kategori besar ( $\geq 0,36$ ).

- d. Nilai *Simpson's Paradox Ratio (SPR)* dan *R-Squared Contribution Ratio (RSCR)* menunjukkan nilai sebesar 0,833 dan 0,979, yang menandakan bahwa tidak terdapat bias arah

hubungan dan kontribusi *R-Square* yang optimal.

- e. Nilai *Statistical suppression ratio (SSR)* sebesar 1,000 dan *Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)* sebesar 0,917 yang menunjukkan bahwa model memenuhi kriteria kelayakan model.

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Hubungan Antar Variabel (Variabel Penjelas > Variabel Respon)	Path Coefficients	P-Value	Keterangan
1.	X1	0,425	0,001	Signifikan
2.	X2	0,349	0,001	Signifikan
3.	X3	0,272	0,011	Signifikan
4.	X1Z	0,045	0,360	Tidak Memoderasi
5.	X2Z	-0,043	0,365	Tidak Memoderasi
6.	X3Z	-0,128	0,145	Tidak Memoderasi

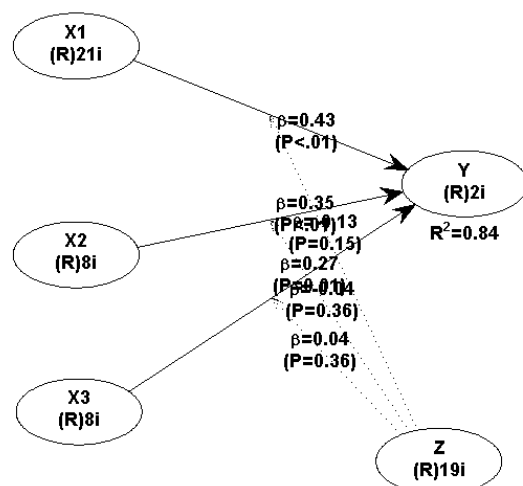
Keterangan :

X1 = Sistem Pengendalian Internal; X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi; X3 = Komitmen Organisasi; X1Z = Sistem Pengendalian Internal\*Kompetensi SDM; X2Z = Pemanfaatan Teknologi Informasi\*Kompetensi SDM; X3Z = Komitmen Organisasi\*Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terbukti memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap Kualitas LKPD. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur masing-masing sebesar 0,425; 0,348; dan 0,272 dengan nilai p-value seluruhnya lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, serta semakin tinggi komitmen organisasi, maka kualitas LKPD juga akan semakin meningkat. Sementara itu, hasil pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, maupun Komitmen Organisasi terhadap Kualitas LKPD. Hal

tersebut terlihat dari nilai koefisien jalur moderasi yang relatif kecil, yaitu 0,045; -0,043; dan -0,128, dengan nilai p-value masing-masing sebesar 0,360; 0,365; dan 0,145 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis keempat, kelima, dan keenam dinyatakan ditolak. Dengan demikian, meskipun Kompetensi SDM secara teoritis berpotensi memperkuat hubungan antarvariabel, dalam penelitian ini perannya sebagai variabel moderasi belum terbukti signifikan terhadap kualitas LKPD.

**Pembahasan**



**Gambar 1**  
**Model Struktural (Inner Model)**

**Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LKPD sebesar 0,425 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas LKPD. Selain itu, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan, maka kualitas LKPD akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kualitas LKPD dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas LKPD. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan adanya potensi asimetri informasi dalam hubungan antara principal dan agent (Halim & Abdullah, 2006). Dalam konteks ini, Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan (Maulida & Tumirin, 2025).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aziyah & Yanto, (2022); Desi Lestari *et al.*, (2022); Harpidalinda & Karpriana, (2024) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat

meminimalkan risiko kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau penggelapan, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas (Desi Lestari *et al.*, 2022). Selain itu, pemerintah diwajibkan menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan penerapan pengendalian intern yang baik akan mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas (Aziyah & Yanto, 2022). Sehingga, hal ini menegaskan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Internal merupakan faktor kunci yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

**Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas LKPD sebesar 0,348 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas LKPD. Selain itu, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin optimal Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diterapkan, maka kualitas LKPD akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kualitas LKPD dinyatakan diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas LKPD, khususnya dalam mendukung akurasi, ketepatan waktu, dan keterpaduan informasi keuangan. Hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aldino & Septiano (2021); Harpidalinda & Karpriana (2024); Ulisanti & Asrori, (2021) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi memungkinkan proses pengelolaan data keuangan dilakukan secara lebih sistematis, sehingga potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan (Alpi & Akbar, 2024).

Sesuai dengan teori *stewardship*, aparat pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana pendukung bagi aparat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, karena teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan (Harpidalinda & Karpriana, 2024). Kondisi ini mendorong terwujudnya laporan keuangan yang lebih andal dan relevan.

#### **Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel Komitmen Organisasi terhadap Kualitas LKPD sebesar 0,272 dengan nilai *p-value* sebesar 0,011. Nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas LKPD. Selain itu, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka kualitas LKPD akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kualitas LKPD dinyatakan diterima.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Harpidalinda *et al.* (2024); Yogantara & Asana (2021) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hubungan positif tersebut sesuai dengan *goal-setting theory*, yang menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi akan menunjukkan upaya kerja yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hasil kerja, termasuk kualitas LKPD (Hutagalung & Simatupang, 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki peranan penting dalam mendorong pemerintah untuk bekerja secara optimal dan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya (Ayem & Amahala, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Anggreni & Dewi, 2022).

#### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur interaksi antara Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD sebesar 0,045 dengan arah hubungan positif. Arah hubungan tersebut mengindikasikan bahwa Kompetensi SDM cenderung memperkuat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas LKPD. Namun demikian, nilai *p-value* yang diperoleh sebesar 0,360 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pengaruh moderasi tersebut tidak signifikan secara statistik.

Dengan demikian, Kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas LKPD, sehingga hipotesis keempat (H4) dinyatakan ditolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM belum mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Kualitas LKPD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Desi Lestari *et al.* (2022); Sambuaga *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. SDM yang kompeten tidak secara otomatis menjamin optimalnya penerapan pengendalian internal, apabila kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak dijalankan secara konsisten dalam praktik pengelolaan keuangan (Desi Lestari *et al.*, 2022).

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori *stewardship*, yang menekankan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* bertindak berdasarkan sistem, aturan, dan prosedur organisasi. Dalam konteks ini, efektivitas sistem pengendalian internal lebih ditentukan oleh konsistensi penerapan kebijakan dan kepatuhan terhadap prosedur dibandingkan oleh tingkat kompetensi individu. Oleh karena itu, meskipun aparatur memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi tersebut tidak secara otomatis memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD. Sistem pengendalian internal telah disusun dengan baik namun terdapat keterbatasan dalam implementasi sehingga menyebabkan pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan (Sambuaga *et al.*, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah cenderung berperan sebagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan

secara langsung, bukan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak mampu memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas LKPD. Koefisien jalur bernilai negatif sebesar  $-0,043$  menunjukkan bahwa kompetensi SDM justru cenderung memperlemah hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Namun demikian, nilai *p-value* sebesar  $0,365$  yang lebih besar dari  $0,05$  mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Desi Lestari *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. emuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan SDM yang kompeten belum tentu mampu mengoptimalkan manfaat teknologi informasi apabila sistem yang digunakan belum terintegrasi dengan baik, belum dimanfaatkan secara maksimal, atau tidak didukung oleh kebijakan dan prosedur yang memadai. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM lebih berperan sebagai faktor yang berdiri sendiri dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, bukan sebagai faktor yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (Sambuaga *et al.*, 2020).

Sesuai dengan teori agensi, pemerintah daerah dipandang sebagai agen yang bertanggung jawab menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai principal. Dalam konteks ini,

pemanfaatan teknologi informasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan yang bersifat struktural dan ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, meskipun aparatur memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi tersebut tidak secara otomatis memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD, karena efektivitas teknologi informasi lebih ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan sistem yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada tingkat kompetensi SDM, tetapi juga pada sejauh mana teknologi informasi dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

**Pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara komitmen organisasi dengan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak mampu memoderasi hubungan antara Komitmen Organisasi dan Kualitas LKPD. Koefisien jalur bernilai negatif sebesar  $-0,128$  menunjukkan bahwa keberadaan Kompetensi SDM justru cenderung memperlemah hubungan antara Komitmen Organisasi dan Kualitas LKPD. Namun, nilai *p-value* sebesar  $0,145$  yang lebih besar dari  $0,05$  mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis keenam ( $H_6$ ) dinyatakan ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya komitmen organisasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai di bidang pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aziyah & Yanto (2022); Harpidalinda *et al.* (2024) dimana kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memperkuat hubungan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi yang

rendah dapat memengaruhi tingkat komitmen pegawai sehingga meskipun komitmen yang tinggi secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi, kondisi tersebut dalam praktik tidak selalu sejalan dengan *goal-setting theory* yang menyatakan bahwa komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi akan berdampak pada peningkatan kinerja (Aziyah & Yanto, 2022)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Komitmen Organisasi dan Kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah, keduanya belum mampu saling memperkuat dalam meningkatkan kualitas LKPD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada komitmen dan kompetensi aparatur, tetapi juga memerlukan dukungan faktor lain yang bersifat sistemik dan terintegrasi agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan secara optimal.

**KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

**Kesimpulan**

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, maupun Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penyebaran kuesioner yang tidak seluruhnya kembali akibat keterbatasan

waktu penelitian, sehingga jumlah data yang diolah, pendalaman informasi responden, serta cakupan wilayah penelitian menjadi terbatas dan representasi populasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, analisis data disesuaikan dengan unit analisis sebanyak 69 OPD melalui perhitungan nilai rata-rata jawaban, yang menyebabkan variasi persepsi responden pada tingkat individu menjadi terbatas.

### Rekomendasi

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang berperan penting sebagai saran untuk studi selanjutnya, yaitu menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian, mengalokasikan waktu yang lebih panjang untuk pendalaman data, serta mengembangkan unit analisis pada tingkat individu maupun organisasi agar hasil penelitian lebih representatif dan komprehensi

### DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Badung. *Menara Ekonomi*, 2, 50–62.
- Alpi, M. F., & Akbar, H. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating sepenuhnya dimana Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mampu menggunakan anggaran*. 7(September), 236–250.
- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 490–500.
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 90–102.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas LKPD Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6, 7–10.
- BPK. (2024). *IHPS SEMESTER I TAHUN 2024*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Desi Lestari, N. K., Kusumawati, N. P. A., & Nuratama, I. P. (2022). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lpd Se-Kecamatan Penebel. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 268–284.  
<https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2306>
- Elfauzi, A. F., & Sudarno, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(59), 1–9.
- Eo Kutu Goo, E. (2022). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LKPD KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 33(1), 1–12.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia:

- Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197.  
<https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Gustina, I. R. A. (2021). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Harpidalinda, S., & Karpriana, A. P. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi*. 3(3), 252–261.
- Harpidalinda, S., Rusliyawati, R., Muhsin, M., & Karpriana, A. P. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi*. 3(3), 252–261.
- Hidayat, D., Sari, M., AR, F., & Azizah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- Hutagalung, D. K., & Simatupang, M. (2023). *Buku Ajar Kepemimpinan* (M. Hidayat & M. Miskadi (eds.); I). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, M. T. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Versi Indonesia)* (W. Hardani & B. A. Yoso (eds.); VII). Penerbit Erlangga.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Julia, D. A., & Wahidahwati, W. (2020). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Kamandita, A. Z., & Suwandi, S. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3, 80–106.
- Kertiriasih, N. N. R., Vipraprastha, T., & Sariyani, N. L. P. (2023). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 08(01), 1–15.
- Locke, E. A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior And Human Performance*, 3(2), 157–189.  
[https://doi.org/10.1016/0030-5073\(68\)90004-4](https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4)
- Lubis, N., Harahap, A. Y., & Syardiansah, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi dan Akuntansi Terhadap Komitmen Organisasi Dimoderasi Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 18, 23–33.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2940>

- 6/jmm.v18i1.3770
- Maulida, B. N., & Tumirin, T. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Eyelink Group). *Jurnal Riset Akuntansi*, 3, 138–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2887>
- Nurdin, E., Lestari, Y., Wahyuni, Z., & Idris, M. F. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(01), 188–201. <https://doi.org/http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH*.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi : Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi* (1st ed.). Merdeka Kreasi Group.
- Raharjo, S. B., Masahere, U., & Widodo, W. (2023). Komitmen organisasi sebagai strategi peningkatan kinerja dan loyalitas karyawan: studi tinjauan literatur. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 4(1), 143–156. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.930>
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>
- Rahman, A., & Putera, A. S. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 228–243.
- Ramadhanti, S. A., & Rufaedah, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 261–269.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Buton Selatan. *Owner*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Sambuaga, F. R., Siahay, A. Z. D., & Falah, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(1), 105–124. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1224>
- Sari, S. I. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP). *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSIAKUNTANSI*, 2(2), 218–229.
- Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi

- Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 255. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25981>
- Siladjaja, M., Nugrahanti, T. P., & Madgalena, P. (2023). *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan Pada Persepsi Berbasis Rational Decision Model Terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas* (M. Jumiati (ed.); 1st ed.). Mega Press.
- Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi* (I. Yunianto (ed.); 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sutrisno, T., & Arsanti, T. A. (2023). PENGARUH GOAL SETTING DAN SELF-EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 7, 96–105.
- Ulisanti, L., & Asrori, A. (2021). Human Resource Competence As a Moderating Variable for the. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 2021(2), 505–518.
- Utami, C. W., Tanesia, C. Y., Suade, Y. K., Aqwila, D. C., Junaedi, A., Padmawidjaja, L., Mastan, S. A., Afandi, P., Alim, R., Lianto, B., & Widiarti, N. S. (2024). *Menggali Teori Manajemen Terupdate: Konsep Dan Aplikasi Dalam Dunia Bisnis Modern* (1st ed.). Penerbit Universitas Ciputra.
- Wahyuni, K. R. N., & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan UMUM Dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15, 415–432.
- Yogantara, K. K., & Asana, G. H. S. (2021). Pengaruh Kualitas Sdm, Motivasi Kerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas LKPD. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 3(1), 85–103. <https://doi.org/10.51713/jamas.v3i1.50>
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68–76.